EDISI 123 TAHUN 2021

TC MEDIA

INSPIRASI UNTUK BERSINERGI

TAHUKAH KAMU?

Tahukah Kamu?
Kilas balik PP

Sekretariat Pengadilan Pajak
Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat
Laman
www.setpp.kemenkeu.go.id
Surel
set.pp@kemenkeu.go.id
informasipp@kemenkeu.go.id
Instagram
set.pp_kemenkeuri
tcmedia_pp

DAFTAR ISI

TC MEDIA Edisi 123 TAHUN 2021

Editorial 4

Infografis
Sosial Media Set. PP 5

Foto Kita 6

Lintas peristiwa 8

Fokus
Pengadilan Pajak Dalam Lini Masa 10
Layanan PP: Banding, Gugatan, PK 13
Layanan PP lainnya: IKH dan SKSP 16

Lokus
Ada Apa Aja di Website Set. PP 18

Profil
Profil Promosi dan Mutasi Pejabat 20
IJV: 2021 Rekan Baru, Energi Baru 22
Teladan dan Idaman, Ridwan Firmansyah 24
Profil Employee Of The Month 30

Rona
Semarak Peringatan HORI ke 75 26
Pak Sesjen Berkunjung 28

IT
Inovasi Aplikatif: Otomasi Macro Pada Ms. Office 30

Kuis 34

Komik
SiTaco #04: Semangat Awal Tahun 35

Tim Penyusunan TC Media Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-17/SP/2020 tanggal 31 Maret 2021

Pengarah I: Sekretaris Pengadilan Pajak
Pengarah II: Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
Penanggung Jawab: Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Redaktur Umum: Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi
Redaktur Pelaksana: Gilang Pratama
Penyunting: M. Hafizullah Lubis
Desain Grafis dan Fotografer: Faishal Chairu Noor, Ridwan Firmansyah
Tim Redaksi: Astris Dyah Perwita, Fadli Robby Mascha, Felixita Novelia, Gabriella Grace, Laurentius Yosi Amanto, Penny Febriana, Rizki Damayanti

editorial

Mayoritas makanan yang berbahan dasar singkong diasosiasikan dengan makanan bersifat kampung atau makanan ketinggalan zaman. Hubungan singkong dengan makanan kampungan tersebut salah satunya disebabkan sifat tanaman singkong yang sangat mudah tumbuh di wilayah tropis. Jenis tanaman ini dapat berkembang dengan baik hanya dengan menanam batang tanpa daun satu pun sehingga keberadaan singkong sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan. Makanan yang dianggap berkelas biasanya didentikkan dengan kelangkaan bahan makanan tersebut sehingga hanya kalangan tertentu saja. Namun, tahukah Anda bahwa singkong atau dikenal dengan nama "cassava" sejatinya tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan bukan tanaman lokal.

Setiap benda memiliki sejarah dan kekhasan yang seharusnya tidak dapat dipandang dari sisi luar. Ketidaktahuan terhadap sesuatu hal disebabkan ketidakmauan menggali informasi lebih jauh. Adapun Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan dalam bidang pemeriksaan dan mengadili sengketa perpajakan memiliki sejarah dan informasi yang belum banyak diketahui. Dengan memperdalam informasi tersebut, pengenalan mengenai Pengadilan Pajak dapat bertambah dan membantu dalam memberikan pelayanan lebih baik karena didasarkan pada pentingnya tugas yang diberikan. Pada edisi kali ini, Pengadilan Pajak menyajikan informasi mengenai hal-hal unik dan yang belum pernah dipaparkan mengenai Pengadilan Pajak

SOSIAL MEDIA SET. PP

Instagram
@set. pp_kemenkeuRI
@tcmedia_pp

WhatsApp
081211007510

Mobile apps
TaxCourt Mobile

Website
www. setpp. kemenkeu. go. id

Lawatan

Suasana kunjungan Sekretaris Jenderal ke Ruang Kerja AP2KI

Foto
Faishal

Renovasi Gedung Pengadilan Pajak

Sejak awal Oktober 2021, beberapa area di lingkungan Pengadilan Pajak sedang mengalami proses renovasi. Renovasi dilakukan antara lain pada Ruang Tempat Pelayanan Terpadu (Ruang TPT) Gedung A dan bagian atap Gedung B. Renovasi pada Ruang TPT Gedung A dimaksudkan untuk menciptakan ruang layanan yang lebih representatif bagi Pengadilan Pajak, sementara renovasi pada atap Gedung B merupakan bagian dari upaya perbaikan dilatasi gedung. Selain itu, renovasi juga dilakukan untuk lebih memperindah tampilan Gedung Pengadilan Pajak dengan melakukan pengecatan ulang eksterior seluruh gedung. Renovasi dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2021.

Teks Fadli **Foto** Faishal

Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2021

Bertempat di Ruang Rapat Besar Gedung F lantai 6, 24 orang pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2021 (UD Tk.I/2021). Ujian Dinas Tingkat I merupakan sebuah proses yang harus ditempuh dalam rangka kenaikan pangkat dari Golongan II/d ke Golongan III/a. UD Tk.I/2021 ini merupakan ujian dinas pertama yang dilaksanakan secara daring. UD Tk.I/2021 dilaksanakan secara serentak oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan pada kantor masing-masing melalui aplikasi Safe Exam Browser yang telah disiapkan pada perangkat masing-masing. Segenap awak TCMedia mengucapkan semoga sukses bagi seluruh peserta UD Tk.I/2021 di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Teks Fadli

Open Workspace Bagian ASP

Bagian Administrasi Sengketa Pajak melakukan perombakan *layout* ruangan dalam rangka mewujudkan Ruang Kerja Masa Depan (RKMD). Perombakan dimaksudkan untuk lebih membuka ruang kerja dan memperbaiki aliran orang dan berkas pada Bagian ASP. Selain itu, konsep *open workspace* juga diterapkan, dimana masing-masing pegawai pada Subbagian Administrasi Banding Gugatan (ABG) tidak lagi memiliki meja kerja yang tetap, namun memiliki meja kerja dan komputer yang digunakan secara bersama oleh pegawai Subbag ABG. Penerapan *open workspace* ini merupakan yang pertama kali diterapkan di Set. PP dan diharapkan dapat menjadi *pilot project* dalam penerapan RKMD di lingkungan Set. PP.

Teks Fadli **Foto** Faishal

Pelantikan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Pengadilan Pajak

Bertempat di Aula Mezanine Gedung Djuanda 1, telah dilakukan pelantikan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama (Prakom Ahli Pertama) Sekretariat Pengadilan Pajak. Pada kesempatan tersebut dilantik 2 (dua) orang pejabat fungsional yaitu Sdr. Gilang Pratama dan Sdr. Lutfi Yostiawan. Sebelumnya, para pejabat fungsional ini adalah pejabat fungsional Pranata Komputer mahir. Seluruh awak TCMedia mengucapkan selamat dan semoga sukses bagi para Prakom Ahli Pertama yang baru dilantik.

Teks Fadli

05/11

Kompetisi Ide Inovasi Sekretariat Jenderal Tahun 2021

Bertempat di Ruang Rapat Salamun AT, Gedung Djuanda I; 3 (tiga) orang pegawai Set. PP, yaitu Sdr. Singgih Rachma Hadi, Sdr. Felixita Novelia C.D., dan Sdr. Retno Astuti R. memberikan presentasi dalam rangka Kompetisi Ide Inovasi Sekretariat Jenderal Tahun 2021 di hadapan para panelis yang beranggotakan para pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal. Proposal ide inovasi dari ketiga pegawai Set.PP tersebut menempati urutan ke-2 dari total sebanyak 50 proposal ide inovasi yang ikut serta dalam kompetisi tersebut. Proposal ide inovasi tersebut mengangkat tema kepedulian sosial di bidang kesehatan dan *charity*. Seluruh awak TCMedia mengucapkan selamat dan semoga sukses ke tahap selanjutnya bagi para inovator dari Set.PP tersebut.

Teks Fadli

08/11

Rapat Kerja Pengadilan Pajak Tahun 2021

Rapat kerja (raker) Pengadilan Pajak tahun 2021 diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 19 dan 25 November 2021. Salah satu perbedaan utama pada rapat kerja tahun ini adalah pelaksanaan raker yang menggunakan metode daring. Selain diisi pemaparan dari Tim Kerja, raker kali ini juga diisi dengan beberapa webinar dari narasumber-narasumber yang kompeten pada bidangnya. Hakim Pengadilan Pajak serta Pejabat dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak dapat mengikuti jalannya Raker melalui aplikasi Zoom.

Teks Fadli **Foto** Faishal

19&26/11

Pengadilan Pajak Dalam Lini Masa

Tentang Pengadilan Pajak

1915, Raad van Belastingzaken (Institusi Pertimbangan Pajak)

Institusi Pertimbangan Pajak atau Raad van Beroep voor Belastingzaken (atau dalam literatur lain disebut juga Raad van Belastingzaken) merupakan cikal bakal lembaga penyelesaian sengketa pajak. Institusi yang berfungsi untuk menyelesaikan silang sengketa perpajakan ini dibentuk pada tanggal 11 Desember 1915 berdasarkan Staatsblad Nomor 707.

1927, Raad van Beroep voor Belastingzaken (Majelis Pertimbangan Pajak)

Selanjutnya Raad van Beroep voor Belastingzaken dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 29 Tahun 1927. Kemudian pada tahun 1959 Raad van Beroep voor Belastingzaken berubah nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959. Fungsi MPP sendiri saat itu adalah sebagai peradilan administratif yang berperan dalam penyelesaian banding di bidang perpajakan. Adapun untuk memeriksa dan memutus permohonan banding di bidang kepabeanan dan cukai, pada tahun 1995 dibentuk Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai (LPBC).

1997, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Tanggal 23 Mei 1997 disahkan UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. BPSP dibentuk untuk menggantikan tugas MPP dan LPBC yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

2002, Pengadilan Pajak

Umur BPSP faktanya kurang dari 5 tahun sebab pada tahun 2002 dibentuk Pengadilan Pajak berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002. Adapun alasan pembentukan Pengadilan Pajak untuk menggantikan BPSP dapat Anda lihat pada pranala berikut.

https://bit.ly/AlasanNomor3Membagongkan

Kedudukan Pengadilan Pajak

Berbeda dengan BPSP yang merupakan peradilan administrasi khusus di bidang perpajakan, Pengadilan pajak yang dibentuk dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan suatu bentuk **peradilan khusus yang kedudukannya berada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**. Namun demikian, terkait kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus tersebut diatur bukan di UU Nomor 14 Tahun 2002, melainkan:

Dalam Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan (pertama) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan "Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang". Adapun penjelasan Pasal 9A adalah "Yang dimaksudkan dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, **misalnya pengadilan pajak**".

Teks
Yosi

Foto
Dokumentasi Set. PP

Dalam Pasal 9A UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan "Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang". Adapun penjelasan Pasal 9A ayat (1) adalah "Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, **misalnya pengadilan pajak**".

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung". Adapun penjelasan Pasal 27 adalah "Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta **pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara**"

Dinamika dalam proses pembentukan UU Pengadilan Pajak

Mulai dari pengajuan rancangan undang-undang sampai dengan persetujuan DPR terhadap rancangan undang-undang, terdapat sejumlah dinamika yang menarik untuk diketahui.

Badan Peradilan Pajak

Dalam rancangan Undang-Undang (RUU), nama badan pengadilan yang diusulkan untuk menjadi pengganti BPSP bukanlah "Pengadilan Pajak", melainkan "Badan Peradilan Pajak (BPP)". Nama RUU-nya pun adalah RUU Badan Peradilan Pajak, bukan RUU Pengadilan Pajak.

Namun dalam laporan pansus yang disampaikan tanggal 13 Maret 2002 dirumuskan bahwa judul RUU yang semula adalah "RUU Badan Peradilan Pajak" diubah menjadi: "RUU Pengadilan Pajak" dengan pertimbangan:

Kata "Peradilan" menunjukkan "proses", sedangkan kata "Pengadilan" menunjukkan "institusi/badan" sehingga bila menggunakan kalimat "Badan Peradilan Pajak" maka terjadi duplikasi. Hal ini sesuai pula dengan Undang-undang lainnya yang mengatur Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan HAM yang semuanya merupakan Badan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum. Di samping itu, Pengadilan Pajak sudah tepat jika berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sekaligus menerapkan asas konkordansi/sinkronisasi dengan Undang-undang lainnya.

RUU tentang Pengadilan Pajak ini merupakan "Lex specialis" yang khusus menyelesaikan sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

Sidang Tertutup

Dalam RUU, diwacanakan pemeriksaan sengketa pajak dalam Badan Peradilan Pajak dilakukan dalam sidang tertutup (bukan sidang terbuka untuk umum). Hal ini dikarenakan sifat kerahasiaan perpajakan yang juga terkait erat dengan interpretasi Pasal 34 Perubahan Kedua UU KUP yang mengatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan, kecuali untuk kepentingan negara dengan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Namun dalam dinamika pembahasan di DPR, yang akhirnya dirumuskan terkait norma persidangan terbuka atau tertutup adalah bahwa untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, persidangan dinyatakan **terbuka untuk umum.** Hal ini dimaksudkan agar persidangan benar-benar dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat ikut serta membantu melaksanakan kontrol pengawasan terhadap jalannya persidangan. Dengan demikian, diharapkan putusan-putusan Majelis Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, Fiskus, dan masyarakat.

Kedudukan secara Geografis

Dalam RUU, kedudukan Badan Peradilan Pajak diwacanakan "berada di Ibukota Negara, namun apabila dipandang perlu dapat dibentuk perwakilan Pengadilan Pajak di Ibukota Provinsi atau di tempat lain". Akan tetapi dalam dinamika pembahasan di DPR, fraksi-fraksi yang ada dan pihak pemerintah sepakat Pengadilan Pajak berkedudukan hanya di Ibukota Negara. Dengan demikian, tidak perlu dibentuk Pengadilan Pajak di Ibukota Provinsi. Akan tetapi, sidang Pengadilan Pajak dapat dilakukan di tempat lain (SDTK) dikarenakan menurut fraksi-fraksi di DPR saat itu, Putusan Pengadilan Pajak mempunyai kekuatan yang sama, baik diputuskan di Ibukota Negara, maupun di tempat lain.

Adapun Pengadilan Pajak baru sekitar 7 tahun menempati Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 seperti saat ini. Sebelum tahun 2015 Pengadilan Pajak berlokasi di Gedung Sutikno Slamet, Kompleks Keuangan Lapangan Banteng, Jalan DR Wahidin Nomor 1.

Referensi artikel di atas dapat dilihat pada pranala https://bit.ly/SilakanBacaKalauGabut

Layanan PP: Banding, Gugatan, PK

Lobby Layanan PP

Foto
Faishal

Secara umum, layanan di Pengadilan Pajak terbagi kedalam tiga kelompok besar, antara lain: Penyelesaian Sengketa Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali. Bagi masyarakat yang pernah atau sering menggunakan layanan di Pengadilan Pajak, mungkin ketiga hal tersebut terdengar sangat lekat dan mudah dipahami, namun terdapat pula Sebagian masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Berikut akan diuraikan secara ringkas terkait Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali.

Banding dan Gugatan

Definisi Banding sebagaimana yang tertian merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan utama pada banding dan gugatan terletak pada objek yang menjadi sengketa, dimana pada proses banding, sengketa diajukan atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding (DJP/ DJBC) yang menitikberatkan pada **substansi** pokok sengketa yang menyebabkan perbedaan dalam perhitungan pajak yang terutang. Sedangkan, objek yang disengketakan dalam gugatan lebih menitikberatkan kepada **prosedur dan ketentuan formal** maupun tata cara dalam melakukan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan.

Adapun beberapa perbedaan mendasar lainnya terkait dengan Banding dan Gugatan dapat dirangkum pada tabel di samping:

Perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan diatas membuat proses pemeriksaan Banding menjadi sedikit berbeda dengan pemeriksaan Gugatan, namun demikian hal tersebut dikembalikan lagi kepada kewenangan Majelis Hakim yang memimpin persidangan. Namun demikian, terdapat kesamaan antara lain baik Banding dan Gugatan, keduanya dapat melalui proses pemeriksaan baik Acara Cepat maupun Acara Biasa.

Untuk mengetahui penjelasan yang lebih rinci terkait dengan Banding dan Gugatan, website Sekretariat Pengadilan Pajak telah menyediakan fitur Satu Klik Informasi yang telah memuat prosedur dan tata cara Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak.

Peninjauan Kembali

Setelah sengketa pajak diputus oleh Majelis Hakim, Para Pemohon maupun Termohon masih bisa menempuh satu upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali. Menurut Pasal 77 UU Pengadilan Pajak, Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali melalui Pengadilan Pajak. Meskipun dapat dipandang sebagai upaya lanjutan atas proses banding atau gugatan, permohonan Peninjauan Kembali tidak

Perihal	Banding	Gugatan
Dokumen sebelum persidangan	1. Surat Banding oleh Pemohon Banding 2. Surat Uraian Banding oleh Terbanding 3. Surat Bantahan oleh Pemohon Banding	1. Surat Gugatan oleh Penggugat 2. Surat Tanggapan oleh Tergugat 3. Surat Bantahan oleh Penggugat
Jangka waktu pengajuan	• Banding terhadap Keputusan DJP: 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang disbanding • Banding terhadap Keputusan DJBC: 60 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang disbanding	• Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan: 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. • Gugatan terhadap Keputusan: 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat
Jangka waktu penyampaian surat balasan oleh Terbanding	3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding	1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan
Jangka waktu sidang pertama dilaksanakan	6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding	3 bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan
Kelengkapan administrasi pengajuan	Bukti pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang	Tidak perlu mencantumkan bukti pembayaran
Jangka waktu penyelesaian sengketa	12 bulan sejak Surat Banding diterima (dapat diperpanjang 3 bulan)	6 bulan sejak Surat Banding diterima (dapat diperpanjang 3 bulan)

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Secara umum, proses PK adalah sebagai berikut:
- Permohonan PK diterima di SetPP (Loket C)
- Permohonan PK dikirimkan ke Termohon PK
- Kontra Memori disampaikan oleh Termohon PK
- Kontra Memori disampaikan SetPP kepada Pemohon PK
- SetPP melakukan penjilidan Berkas PK (Bundel B) dan Berkas Persidangan (Bundel A)
- Setelah berkas dilimpahkan dari SetPP ke MA, akan terbit register PK
- MA mengeluarkan Putusan PK dan kemudian dikirimkan ke SetPP
- SetPP mengirimkan Putusan PK ke para pihak

Proses Peninjauan Kembali tertuang secara lengkap pada Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan Hukum Acara yang berlaku dalam Peninjauan Kembali tertuang dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung.

Untuk mengetahui penjelasan yang lebih rinci terkait dengan Peninjauan Kembali, website Sekretariat Pengadilan Pajak telah menyediakan fitur Satu Klik Informasi yang telah memuat alasan-alasan, jangka waktu, dan gambaran proses Pengajuan Peninjauan Kembali.

Teks: Penny

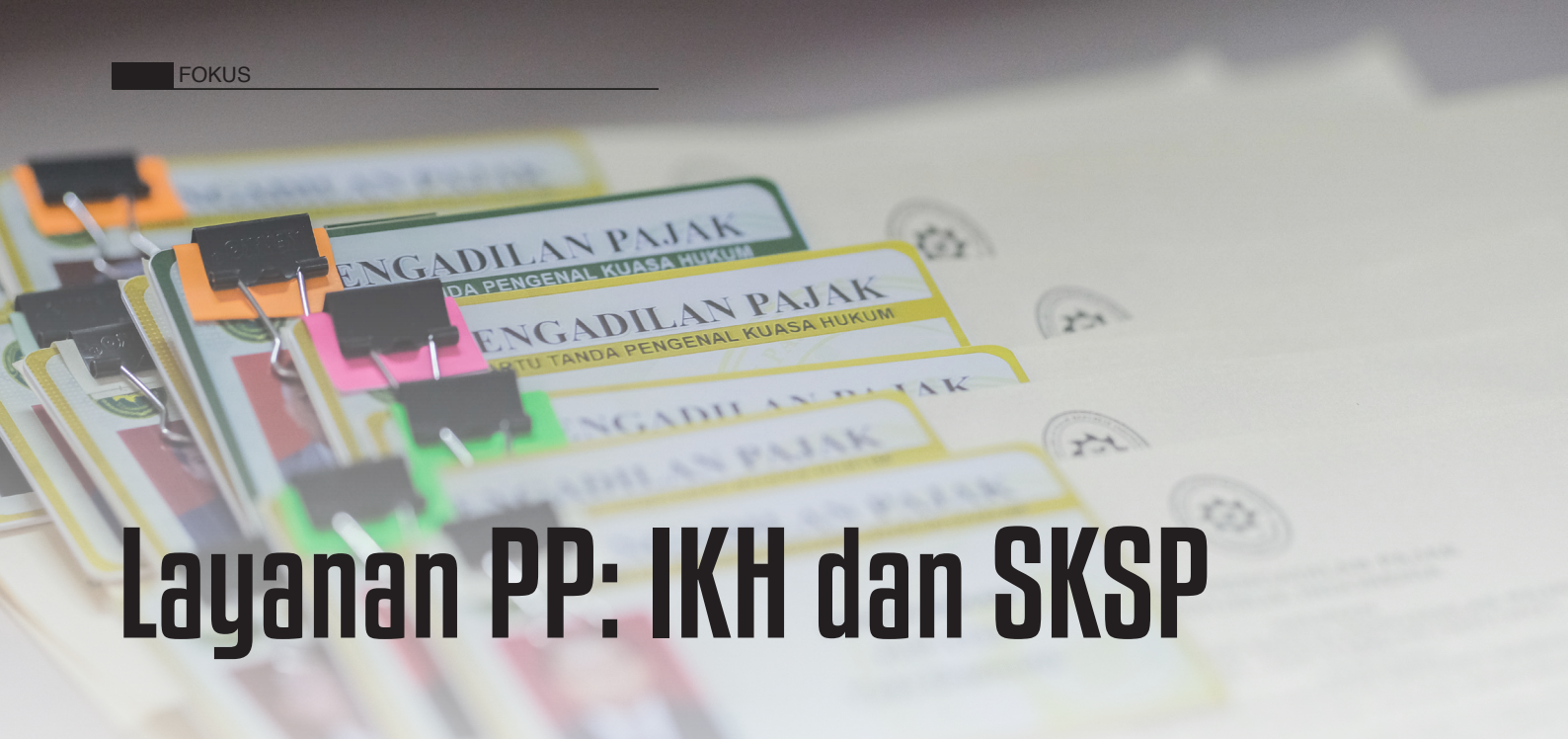

Layanan PP: IKH dan SKSP

Salah satu layanan Sekretariat Pengadilan Pajak adalah memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP). SKSP adalah surat keterangan yang menginformasikan perihal ada atau tidaknya sengketa Wajib Pajak perorangan maupun perseroan di Pengadilan Pajak dalam kurun waktu tertentu. SKSP akan diterbitkan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan setelah diterbitkan, SKSP akan dikirimkan via pos ke alamat korespondensi yang telah ditentukan oleh Pemohon.

SKSP

Terkait SKSP sebenarnya belum ada peraturan formal yang mengatur tentang prosedur ataupun aspek administratif dalam penerbitan SKSP ini, namun ternyata terdapat kebutuhan atas praktik bisnis yang berlaku umum dimana SetPP perlu memfasilitasi badan usaha atau perseorangan yang membutuhkannya. Mengutip informasi dari hukumonline.com, dalam proses uji tuntas atau biasa juga disebut dengan *legal due diligence* disebutkan bahwa terdapat banyak dokumen yang perlu diperiksa dalam prosesnya, salah satunya adalah dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Badan Usaha yang mengajukan permohonan SKSP adalah sebagai berikut:

- Asli surat permohonan yang ditanda tangani oleh pengurus perusahaan atau kuasa;

- Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya SKSP, dengan penjelasan sebagai berikut:
Pemohon SKSP perlu menyertakan adanya dokumen yang berisi dasar hukum/dasar persyaratan tertulis yang mendasari alasan diperlukannya Pengadilan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Sengketa Pajak untuk pemohon. Dokumen yang dimaksud bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan tujuan SKSP itu sendiri.
Contoh:
Jika tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan adalah mengikuti lelang proyek, maka dasar persyaratan yang dilampirkan adalah fotokopi persyaratan lelang proyek.
- Asli surat kuasa bermeterai (jika dikuasakan);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku;
- Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kemenkumham (untuk perusahaan berbadan hukum);
- Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang mencantumkan nama pengurus yang menandatangani surat permohonan atau memberi kuasa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pemohon cukup melampirkan halaman depan, halaman susunan pengurus pada akta perubahan terakhir (bukan keseluruhan lembar akta), yang di dalamnya terdapat nama pengurus perusahaan/pemberi kuasa.
- Fotokopi NPWP Badan Hukum (perusahaan), pemohon, pengurus perusahaan, dan penerima kuasa.

Sedangkan untuk permohonan SKSP Perseorangan, syarat yang diperlukan tidak sebanyak permohonan SKSP Badan Usaha/Perseroan. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- Asli surat permohonan yang ditanda tangani oleh

pengurus perusahaan atau kuasa;
- Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya SKSP;
- Asli surat kuasa bermeterai (jika dikuasakan);
-Fotokopi NPWP pemohon dan penerima kuasa.

Izin Kuasa Hukum (IKH)

Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak dapat diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 34 ayat (1). Lebih lanjut dinyatakan bahwa persyaratan mengenai Kuasa Hukum, selain yang tercantum dalam UU Pengadilan Pajak, ditentukan persyaratan lain oleh Menteri Keuangan, yang dinyatakan dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

Penerbitan Izin Kuasa Hukum (IKH) merupakan salah satu layanan dari Sekretariat Pengadilan Pajak yang akan diproses dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Terdapat 2 jenis IKH, yaitu IKH Bidang Perpajakan dan IKH Bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana tiap jenis IKH digunakan untuk mewakili jenis sengketa yang berbeda. Satu orang Pemohon dapat mengajukan untuk 2 jenis IKH sekaligus. Untuk setiap IKH akan dikeluarkan 2 produk, antara lain:
- Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum;
- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum;
yang berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.

IKH akan diterbitkan tanpa adanya pemungutan biaya, sepanjang para pemohon melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

A. Untuk Pemohon Baru:
- Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan/Kepabeanan dan Cukai pada Pengadilan Pajak;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Fotokopi KTP;
- Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan untuk lulusan perguruan tinggi di Indonesia atau fotokopi Surat Keputusan penyetaraan ijazah lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemristekdikti;
- Fotokopi Dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan atau Kepabeanan dan Cukai;
- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan;
- Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- Pakta integritas Pengajuan Izin Kuasa Hukum;
- Khusus Pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak, maka Pemohon harus telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

B. Untuk Perpanjangan Izin:
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Fotokopi KTP;
- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku
g. Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan;
- Fotokopi Salinan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum terakhir;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Terakhir;

Lebih lanjut keterangan terkait dengan SKSP dan IKH dapat dilihat pada tautan berikut: http://www.setpp.kemenkeu.go.id/faq atau pindai QR Code pada akhir artikel ini

Teks: Penny

Ada Apa *Aja* di Website Set. PP?

"Website SetPP (www.setpp.kemenkeu.go.id) memuat sangat banyak informasi terkait berbagai layanan di Pengadilan Pajak. Untuk para pencari layanan informasi di Pengadilan Pajak dapat memaksimalkan penggunaan website untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Para pencari layanan informasi dapat mencari secara mandiri beberapa informasi penting dalam website SetPP. Selengkapnya, simak penjelasan berikut terkait beberapa fitur yang sangat bermanfaat dalam website SetPP.

Teks: Penny

1. Satu Klik Informasi

Dalam Satu Klik Informasi terdapat berbagai informasi terkait alur proses layanan di Pengadilan Pajak, mulai dari antrean online, proses banding dan gugatan, peninjauan kembali, proses pengajuan Izin Kuasa Hukum (IKH), proses Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP), hingga persidangan.

2. Pengecekan Jadwal Sidang

Selain dari Undangan atau Surat Pemberitahuan yang dikirimkan oleh Panitera kepada Para Pihak yang akan bersidang, pengecekan jadwal sidang juga bisa dipantau melalui menu Layanan, sub menu Info Persidangan.

3. Unduh Putusan Pengadilan Pajak

Untuk mempermudah akses terhadap putusan Pengadilan Pajak, Putusan yang diucap tahun 2019 dan seterusnya telah dapat diunduh secara lengkap pada website SetPP pada menu Daftar Putusan pada bagian kanan website.

Profil Promosi dan Mutasi Pejabat

"

Pada bulan Oktober Tahun 2021, Sekretariat Pengadilan Pajak (Set. PP) menyambut kehadiran empat Pejabat Administrator dan dua Pejabat Pengawas baru di lingkungan Set. PP.

Dua Pejabat Administrator dan satu Pejabat Pengawas merupakan Pejabat mutasi yang sebelumnya berasal dari luar lingkungan Set. PP. Sedangkan dua orang Pejabat Administrator dan satu orang Pejabat Pengawas lainnya adalah merupakan hasil dari promosi jabatan internal Set. PP. Untuk mengenal lebih jauh para Pejabat baru tersebut, TCMedia memberikan profil singkat untuk masing-masing pejabat.

MUTASI

Drs. Ilhan Lasahido, M.M.

Pria kelahiran Surabaya tahun 1965 ini sebelumnya berkarir di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jabatan terakhir yang diemban beliau sebelum mutasi ke Set. PP adalah sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan Pengelolaan Kinerja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Di Sekretariat Pengadilan Pajak, beliau mengemban jabatan baru sebagai Kepala Bagian Administrasi Putusan, Persidangan, dan Kepatuhan Internal. Mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1997, beliau merupakan Pejabat Administrator paling senior di lingkungan Set. PP.

Akhirruddin, S.H., M.M.

Pria kelahiran Bukittinggi tahun 1971 ini sebelumnya berkarir di Direktorat Jenderal Pajak. Mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1998, jabatan terakhir yang diemban beliau sebelum mutasi ke Set. PP adalah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi. Di Sekretariat Pengadilan Pajak beliau mengemban jabatan baru sebagai Sekretaris Pengganti Majelis XB.

Abdi Yantono

Pria kelahiran Kwala Bingai tahun 1980 ini sebelumnya berkarir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak tahun 2000, jabatan terakhir yang diemban beliau sebelum mutasi ke Set. PP adalah sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe C Kupang. Di Sekretariat Pengadilan Pajak beliau mengemban jabatan baru sebagai Pembantu Sekretaris Pengganti 1 Majelis IXB.

Abdi Yantono

Akhirruddin

Ilhan Lasahido

Profil Pegawai Mutasi

Foto
OSDM

Zul Ashari

Roni Ziyardi Yasmi

Gabriela Grace

Profil Pegawai Promosi

Foto
OSDM

PROMOSI

Zul Ashari, S.E., M.M.

Pria kelahiran Jakarta tahun 1970 ini merupakan wajah yang familiar di Set. PP. Mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1999 di Direktorat Jenderal Pajak, Pak Zul sebagaimana beliau akrab di sapa, mengalami tour of duty dengan mutasi ke Set. PP pada Oktober 2008. Sejak saat itu, beliau mengemban jabatan sebagai Pembantu Sekretaris Pengganti pada Majelis IIB, sampai dengan waktu promosi jabatannya. Beliau kemudian mengalami promosi dan saat ini mengemban jabatan baru sebagai Sekretaris Pengganti Majelis XIB.

Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M.

Pria kelahiran Bukittinggi tahun 1972 ini merupakan wajah yang familiar di Set.PP. Mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1998 di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), beliau mengalami secara langsung proses transformasi BPSP menjadi Pengadilan Pajak yang kita ketahui sekarang. Pria yang gemar berolahraga ini sebelumnya mengemban jabatan sebagai Pembantu Sekretaris Pengganti Majelis XXB. Beliau kemudian mengalami promosi dan saat ini mengemban jabatan baru sebagai Sekretaris Pengganti Majelis XXB

Gabriela Grace, S.E., M.App.Ec

Satu-satunya Wanita dalam seri profil kali ini, Kak Gaby sebagaimana beliau akrab di sapa adalah Pejabat Pengawas yang baru mengalami promosi jabatan pada bulan Oktober lalu. Wanita kelahiran Jakarta tahun 1989 ini mengawali karir di Sekretariat Pengadilan Pajak sejak tahun 2012. Kak Gaby berkesempatan mengembangankan kompetensinya dengan melaksanakan tugas belajar di Australia pada tahun 2017. Penugasan terakhir beliau sebelum promosi adalah sebagai staf pada Majelis XVA. Saat ini beliau menjabat sebagai Pembantu Sekretaris Pengganti Majelis IIB.

Segenap awak TCMedia mengucapkan selamat datang kepada Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang mengemban jabatan baru. Semoga sukses dalam jabatan baru, dan selalu menjaga integritas dalam berkarya.

Teks: Fadli

Teks: Felix

Rekan Baru Energi Baru

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan potensi pegawai Kementerian Keuangan serta pemenuhan kebutuhan pegawai maka dilaksanakanlah Internal Job Vacancy (IJV) di lingkungan Kementerian Keuangan. Begitu pula di Sekretariat Pengadilan Pajak, pada bulan Oktober 2021 kedatangan 13 (tiga belas) orang pelaksana yang lolos seleksi IJV untuk bergabung bersama keluarga besar Sekretariat Pengadilan Pajak.

Rizka Sahputri (Rizka)
Penempatan saat ini: Majelis IIIB
Pendidikan terakhir: D3 Pajak
Hobi: Travelling, Sports (Running), Reading books
Pesan untuk SetPP: Cheer up!!!

Sonia Trisnawati (Sonia)
Penempatan saat ini: Majelis VIB
Pendidikan terakhir: D3 Akuntansi
Hobi: Photography, Writing/Blogging, Travelling, Public Speaking, Sports (Basketball), Sing, Enterpreneurship, Music (Keyboard)
Pesan untuk SetPP: Semoga selalu menuju ke kesempurnaan memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati, bekerja profesional dan berintegritas tanpa menanggalkan sinergi dalam bekerja

Moh. Ahsanul In'am Hidayatullah (In'am)
Penempatan saat ini: Majelis IIIA
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Travelling, Sports (E-Sport), Game
Pesan untuk SetPP: Semoga SetPP menjadi instansi yang semakin profesional dan kredibel

Diendha Amelinda (Dinda)
Penempatan saat ini: Majelis XIVA
Pendidikan terakhir: D3 Akuntansi PKN STAN
Hobi: Photography, Travelling, Cullinary
Pesan untuk SetPP: maybe a little periodic event to lighten the mood?

Muhammad Ikhsan Ramadhani (Ican)
Penempatan saat ini: Majelis IA
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Photography, Sports (Muay Thai), Sing, Stock Exchange, Videography/Blog, Graphic Design
Pesan untuk SetPP: Please digitalized the whole system. Use nadine for internal communication too :(

Zeni Virdiani (Zeni)
Penempatan saat ini: Majelis XVA
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Travelling, Cullinary
Pesan untuk SetPP: sudah baik, tingkatkan lagi

Inas Putri Mayangsari (Inas)
Penempatan saat ini: Majelis XVA
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Cullinary
Pesan untuk SetPP: Semoga set pp semakin baik

Bhara Aditya Patriatama (Bhara)
Penempatan saat ini: Majelis VB
Pendidikan terakhir: D3 Perpajakan Universitas Diponegoro
Hobi: Sports (Volley)
Pesan untuk SetPP: SetPP luar biasa

Risal Juniar Rahman (Ical)
Penempatan saat ini: Majelis XIIB
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Photography, Travelling, Enterpreneurship, Cullinary, Graphic Design, Game
Pesan untuk SetPP: Semoga bisa lebih baik lagi

Aryan Yunast Ristiovan (Aryan)
Penempatan saat ini: Majelis VIIIB
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Travelling, Sports (Archery)
Pesan untuk SetPP: Terima kasih sudah menjadi rumah yang nyaman bagi kami

Anadio Vikko Soerosoputra (Dio)
Penempatan saat ini: Majelis IVB
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Sports (Badminton), Enterpreneurship, Stock Exchange, Music (Guitar)
Pesan untuk SetPP: Sikat berkas sampai tuntas!

Resty Arista Utami (Resty)
Penempatan saat ini: Majelis XIVB
Pendidikan terakhir: D3 Pajak PKN STAN
Hobi: Travelling, Cullinary, Dance
Pesan untuk SetPP: Setpp semoga semakin baik

Fernando Buana Putra (Fernando)
Penempatan saat ini: Majelis VIA
Pendidikan terakhir: : D3 Akuntansi PKN STAN
Hobi: Travelling, Stock Exchange, Game
Pesan untuk SetPP: Gedung kantor punya nuansa horor tersendiri kalau diajak lembur sampai Isya

Selamat datang di Sekretariat Pengadilan Pajak,

Profil Pegawai IJV

Foto
OSDM

Dio

Aryan

Bhara

Dinda

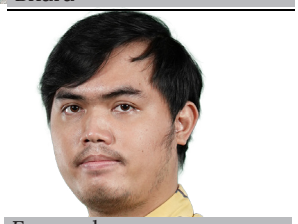
Fernando

Inas

In'am

Ican

Resty

Ical

Rizka

Sonia

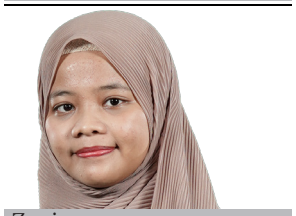
Zeni

Teladan dan Idaman

Ridwan Firmansyah

Pada tanggal 25 Agustus 2021 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan Bincang Inspiratif bersama dengan pegawai inspiratif di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam bincang tersebut nampak wajah yang tidak asing bagi pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak, yaitu Ridwan Firmansyah salah satu pelaksana di Sekretariat Pengadilan Pajak.

Sebuah kebanggaan bahwa terdapat salah satu pegawai di Sekretariat Pengadilan Pajak dapat terpilih sebagai pegawai inspiratif di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ridwan Firmansyah, lahir di Kendal pada 9 April 1995 pegawai lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2017 ini mulai bergabung dengan Sekretariat Pengadilan Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. Pertama kali ditempatkan sebagai pelaksana pada Majelis XII dan saat ini ditugaskan untuk menjadi pelaksana di Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada edisi kali ini Tim TCMedia berkesempatan untuk berbincang dengan Ridwan terkait dengan inovasi dan tentunya tentang keberhasilannya meraih penghargaan sebagai pegawai inspiratif di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Menurut Ridwan, inovasi itu apa sih?

Menurut saya pribadi inovasi adalah setiap upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan: untuk menghadirkan penyegaran dan pembaharuan dalam organisasi; atau untuk mempermudah serta mempercepat sebuah proses dalam organisasi.

Apakah kamu pernah melihat sebuah inovasi yang membuat kamu terinspirasi?

Pernah dan banyak. inovasi kan gak harus sesuatu yang besar. Bahkan sebatas memberi label pada dokumen berdasarkan prioritas, secara mandiri mengelompokkan penyimpanan berkas sesuai dengan jadwal sidang, atau memanfaatkan fitur macro untuk pekerjaan yang berulang pun termasuk inovasi.

Kalau kita nunggu inovasi yang besar dulu baru merasa terinspirasi, bisa-bisa kita hanya terinspirasinya setahun sekali saja. Kenapa kita gak mau membuka mata terhadap inovasi-inovasi kecil? justru dengan melihat dan mau mengakui inovasi-inovasi yang dianggap "receh", kita akan lebih sering terinspirasi dan pribadi kita jadi lebih positif.

Penasaran nih, ada gak sih tokoh yang menjadi inspirasi Ridwan?

Saya tidak secara khusus mempunyai tokoh yang menginspirasi saya. Tapi saya berpegang pada prinsip 'Setiap orang dapat menjadi inspirasi bagi siapapun, tergantung dari kacamata mana yang akan kita gunakan.'

Kalau menurut Ridwan apa sih yg perlu dipertajam untuk bisa berpikir kreatif?

Ambisi untuk menyelesaikan pekerjaan atau rutinitas dengan cepat. Karena saya pribadi, semakin saya ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat maka saya terdorong untuk mencari-cari cara kreatif untuk dapat mempercepat pekerjaan saya. Analoginya seperti ini: Misalkan saya mendapatkan sekian banyak pekerjaan untuk diselesaikan dalam sekian jam, nah saya selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya kurang dari waktu yang diberikan. Sehingga waktu yang tersisa dapat saya gunakan untuk hal lain, seperti: mempelajari hal baru; atau mengeksplorasi proses-proses pekerjaan di kemudian hari yang mungkin bisa diselesaikan dengan kreatif. Intinya jangan menjadi malas, jangan sampai kita terjebak oleh rasa nyaman dan jangan biarkan pikiran kita terpengaruh oleh sugesti-sugesti buruk yang menyeret kita ke arah demotivasi.

Pertanyaan terakhir, nih, Ridwan yang bikin kita penasaran banget. Bagaimana, sih, kamu bisa terpilih menjadi pegawai inspiratif di lingkungan Sekretariat Jenderal?

Awalnya karena saya pada awal tahun berhasil menemukan sebuah celah keamanan pada salah satu aplikasi internal Kemenkeu yang berpotensi menyebabkan kebocoran data milik Kementerian Keuangan. Kemudian karena temuan tersebut saya diusulkan sebagai salah satu kandidat KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa) dari Setjen. Kemudian saya sering berpartisipasi aktif di beberapa kepanitiaan kegiatan besar Set. PP serta aktif di TIM PERSPEKTIF. Walaupun sebenarnya semua itu bukan tusi saya, tapi saya tidak membatasi diri dan selalu terdorong untuk mencoba hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi organisasi. Mungkin hal-hal tersebut yang membuat pimpinan akhirnya memilih saya sebagai pegawai inspiratif di Setjen.

Wah, seru *banget,* yaa, bincang bersama Ridwan. Tentunya menambah semangat kita juga untuk tetap berpikir kreatif dan inovatif, dong. Yang terpenting adalah untuk selalu menjaga rasa ingin tahu dan memiliki keinginan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi sehingga ide maupun inovasi baru akan senantiasa muncul. Namun tentunya merealisasikan ide atau gagasan tersebut menjadi langkah berikutnya karena bila tidak diwujudkan, ide hanyalah sebatas ide yang tidak memiliki kegunaan.

"Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri dan jadilah role models di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan, jika diri kalian sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan." –Sri Mulyani Indrawati

Teks: Felix
Foto: Faishal

Semarak Peringatan HORI ke 75

Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Tepercaya, Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh

Teks: Felix

Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75, Kementerian Keuangan menyelenggarakan banyak kompetisi mulai dari kompetisi tentang seni dan budaya hingga olahraga dan asah otak. Pada masa pandemi ini tentu saja banyak halangan dan rintangan dalam penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75 yang dihadapi panitia penyelenggara, namun hal itu tidak menyurutkan semangat KEMENKEU SATU untuk mewujudkan terselenggaranya peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75 dan dengan antusiasme yang besar dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Penasaran kan ada apa saja sih di peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75 kali ini? Mari kita simak sama-sama!

Kompetisi Seni dan Budaya

Rangkaian kompetisi seni dan budaya diselenggarakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75, kompetisi yang diselenggarakan antara lain Lomba Video dan Poster bertema Satu Aksi Seribu Arti Untuk Bumi, Lomba Cipta Puisi, Lomba Foto, Song Cover Competition HORI 75, Kompetisi Stand Up Comedy Virtual Hari Oeang 75, Lomba Voice Over Hari Oeang 2021, Kompetisi Video Reels Hari Oeang 75, Lomba Desain Maskerkeu serta Lomba Menulis Esai.

Dalam kompetisi ini Vicky Eka Ardiansa pelaksana pada Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi berhasil meraih Juara Favorit 3 dalam Lomba Video dan Poster bertema Satu Aksi Seribu Arti Untuk Bumi.

Selain itu Anadio Vikko Soerosoputra pelaksana pada Majelis IVB yang tergabung dalam tim PRAKARYA juga berhasil meraih Juara 1 Song Cover Competition HORI 75.

Selamat kepada rekan-rekan tetap semangat dalam berkarya!

Kompetisi Olahraga dan Asah Otak

Ministry of Finance e-Sport Competition, Turnamen Catur, HORIDE, Kompetisi Data Story Telling, dan Oeang Run merupakan rangkaian Kompetisi Olahraga dan Asah Otak yang diselenggarakan dalam rangka menyemarakan Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75.

Dalam kompetisi ini sebagai satu tim Sekretariat Jenderal berhasil meraih Juara 3 pada Oeang Run serta Juara 1 pada Kemenkeu Satu Loop dalam kompetisi HORIDE. Selain itu ada rekan kita Sylvana Noviakusuma yang turut berpartisipasi bersama Tim Setjen dan memenangkan Juara 3.

Selamat kepada rekan-rekan yang tergabung dalam tim tersebut, dan tetap semangat dalam meraih prestasi!

Webinar dan Workshop

Serangkain kegiatan webinar dan workshop diselenggarakan dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke 75 dan juga dalam rangka pengembangan kompetensi baik *soft skill* maupun *hard skill* bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Mulai dari Bincang APBN yaitu diskusi mengenai APBN 2022 bersama berbagai narasumber dari internal dan eksternal Kemenkeu hingga *workshop* terkait psikoedukasi dengan tema "*Work Life Balance in Pandemic*".

Acara Puncak peringatan HORI ke 75

Setelah rangkaian kegiatan yang begitu menarik dan bermanfaat, khususnya bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Tentu belum lengkap tanpa adanya Acara Puncak Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke 75. Walaupun dilaksanakan secara virtual dalam rangka membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 namun hal ini tidak menyurutkan antusias peserta.

Apalagi dengan disuguhkannya tarian yang sangat indah dari grup tari Kementerian Keuangan MOF Dancer, dalam penampilan tersebut ada dua wajah yang sangat familiar bagi rekan-rekan di Pengadilan Pajak, yaa, rekan kita Astris Dyah Perwita dan Ameliya Silaning Utami adalah salah satu penari yang tampil pada Acara Puncak Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke 75.

Acara puncak dilaksanakan pada 19 November 2021 dan disaksikan secara langsung oleh pegawai Kementerian Keuangan melalui saluran Youtube Kementerian Keuangan.

Diharapkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pada Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke 75 ini, pegawai dapat meningkatkan semangat KEMENKEU SATU serta semangat dalam meraih prestasi baik dalam Tusi maupun Non-Tusi!

Kegiatan HORI 75
Foto
Panitia Family Gathering HORI 75

Pak Sesjen

Setelah resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan pada Bulan Maret lalu, akhirnya Bapak Heru Pambudi berkesempatan menyambangi Kantor Sekretariat Pengadilan Pajak pada Selasa 2 November 2021. Didampingi beberapa pejabat Eselon 2 lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro SDM, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan serta Kepala Pusintek, rombongan tiba di Set. PP sekitar pukul sebelas siang dan disambut langsung oleh pimpinan Set.PP.

Seperti tak kehabisan akal, agar keluarga besar Set. PP dapat merasakan suasana kunjungan ini meskipun tidak terlibat langsung karena kondisi WFH, pimpinan Set. PP menjadikan kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui *Zoom meeting* sejak awal kedatangan Sesjen di halaman Gedung BPKP.

Rombongan bergerak mulai dari Gedung A yang merupakan tempat penyelenggaraan sidang. Di lantai satu, Pak Heru Pambudi mengunjungi Ruang Tunggu Pemohon Banding dan melakukan dialog singkat bersama beberapa Wajib Pajak yang ada di sana. Mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menanyakan langsung terkait tanggapan Pemohon Banding tentang pelaksanaan sidang secara elektronik di Pengadilan Pajak.

Usai berinteraksi dengan para pihak yang beracara di Pengadilan Pajak, Pak Sesjen juga menyempatkan diri untuk mengintip sebentar pelaksanaan sidang di lantai dua Gedung A untuk kemudian beralih ke ruang kerja di Gedung B. Dan ruangan Majelis yang berhasil mendapatkan lawatan tersebut adalah Majelis VIII dan Majelis VII.

Pria kelahiran Bondowoso, Jawa Timur ini menghabiskan cukup banyak waktu di dua majelis yang ia kunjungi tersebut. Selaras dengan ucapannya kemudian di akhir kunjungan yaitu beliau tidak ingin kunjungan ke Set. PP hanya sekedar seremonial belaka, Pak Sesjen benar-benar menjadikan kedatangannya untuk berinteraksi langsung dengan pegawai yang ada di Majelis.

Mulai dari berkenalan dengan staff yang berada di ruangan kerja sampai terlibat obrolan yang lebih spesifik. Pak Sesjen terlihat menyamankan diri dengan duduk di salah satu kursi untuk kemudian berbincang-bincang dengan pegawai. Beliau menanyakan mengenai karir dan pengalaman bekerja hingga bagaimana pola kerja di Set. PP. Tak ketinggalan, beliau juga memberikan motivasi bagi pegawai untuk bekerja lebih giat dan mengembangkan potensi diri.

Tak hanya sampai disitu namun lulusan Universitas of Newcastle Upon Tyne ini juga mengobrak-abrik ruangan kerja dan menyusuri meja-meja pegawai untuk melihat realita di Set. PP. Beliau menyaksikan langsung banyaknya tumpukan berkas yang ditangani pegawai.

Sebelum bertolak ke Gedung F, ada hal menarik yang kerap dilakukan Pak Sesjen saat menyadari keberadaan satu

Berkunjung

benda yang ada di tiap ruangan yaitu kaleng kerupuk. Beliau sampai mengangkat kaleng tersebut sambil tertawa sumringah dan meminta konfirmasi Kepala Biro Umum Setjen, "Kayaknya ini benda wajib, ya, Pak Sugeng."

Menghabiskan waktu lebih dari satu jam di Gedung B tidak membuat pria kelahiran 11 Februari 51 tahun silam ini lelah untuk meninjau kondisi Set.PP secara langsung di lapangan.

Beliau kemudian mengunjungi ruang kerja ASP, AP2KI dan TIK dan kembali berbincang-bincang dengan pegawai yang *standby* di sana. Mulai dari pembahasan mengenai kondisi ruangan kerja yang dipenuhi berkas, permasalahan yang dihadapi pegawai dan juga rencana aksi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Namun lawatan belum berakhir sampai disitu, Pak Sesjen kemudian menyapa para pegawai baik secara langsung dan juga via Zoom di ruangan rapat Gedung F lantai 6. Beliau didampingi pimpinan Set.PP dan beberapa pejabat Eselon 2 Setjen, mendengarkan paparan terkait dengan pelaksanaan sidang elektronik yang telah berlangsung di Set.PP dan juga rencana penerapan e-Tax Court.

Presentasi tersebut berlangsung cukup hangat dengan aktifnya Pak Sesjen memberikan *feedback* secara langsung terkait isu-isu yang beliau garis bawahi. Seperti memberikan arahan untuk melakukan *brainstorming* ke Pengadilan-Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri terkait pelaksanaan sidang secara elektronik. Beliau juga secara langsung memberikan jawaban atas kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh Set.PP dalam pelaksanaan sidang secara elektronik ini.

Terkait dengan e-Tax Court, Pak Sesjen juga menyatakan dukungannya dan bahkan mendorong agar proses modernisasi administrasi dan penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Pajak ini dapat dipercepat realisasinya. Beliau juga bersedia untuk mendukung semua upaya termasuk turun tangan langsung apabila diperlukan dalam proses pengurusan regulasi ke level tertinggi.

Pak Sesjen juga memberikan saran-saran perbaikan untuk internal Set.PP berdasarkan pengamatannya secara langsung ke ruang-ruang kerja sebelumnya. Diantaranya terkait dengan penataan ruang kerja, manajemen berkas sengketa, pola kerja pegawai, dan juga peningkatan Sumber Daya Manusia.

Namun di balik itu semua Pak Sesjen sangat mengapresiasi para pegawai di lingkungan Set. PP yang masih bersemangat dan tetap mengukir prestasi di berbagai bidang walaupun penuh dengan keterbatasan dari segi sarana prasarana khususnya ruang kerja yang sangat terbatas dengan banyaknya tumpukan berkas.

Teks: Riz

Foto
OSDM

Teks
Penny & Riz

Profil EOM

EOM Juli 2021 - Ridwan

Ridwan Firmansyah mengaku tidak menduga awalnya akan dinominasikan menjadi EOM Juli 2021, mengingat ia baru saja dimutasi ke Bagian TIK. Ridwan dikenal sebagai pegawai yang kreatif dan inovatif. Hal ini didorong oleh filosofi yang ia pegang dalam bekerja. "*Kita bekerja dengan baik itu karena memang kita menjalankan peran kita menjadi manusia yang bermanfaat*" ungkap Ridwan. Motivasinya dalam bekerja datang dari orang-orang disekitarnya, mulai dari keluarga, istri, serta teman-teman di tempatnya bekerja. Ia selalu berprinsip bahwa tidak semua orang hebat dalam semua hal. Namun ia selalu berusaha melihat sisi hebat dari setiap orang dan meneladaninya serta menjadikannya sebagai motivasi. Ridwan mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk semua pihak yang telah mendukungnya. "*Dukungan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk apapun akan ia jadikan sebagai dorongan untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk organisasi.*"

EOM Agustus 2021 - Subhan

Subhan adalah pegawai di Majelis XVIA yang telah bekerja di Sekretariat Pengadilan Pajak (Set. PP) sejak tahun 2003. Ia mengaku sangat senang mendapatkan gelar EOM pada bulan Agustus 2021, terlebih ketika mendapatkan hadiah dari pimpinan Set. PP. Dirinya sangat senang mendapatkan apresiasi tersebut. Namun, terlepas daripada itu semua, sebenarnya beliau sudah sangat senang apabila dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. "*Pekerjaan selesai, saya sudah senang,*" demikian jawabnya dengan sederhana ketika ditanya hal yang memotivasinya dalam bekerja. Ia juga tidak pernah merasa stres atau kesulitan dalam bekerja karena selalu ada teman-teman dan atasan yang mendukungnya. Ia berpesan agar para pegawai Set. PP bisa terus semangat bekerja dan juga tidak lupa beribadah.

EOM September 2021 - Wachid Rowinanto

Menjadi pemenang EOM pada Bulan September 2021, Wachid Rowinanto mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih atas dukungan segenap keluarga besar Set.PP, terutama juga dengan diberikannya apresiasi dari Sekretaris, Wakil Sekretaris beserta Kepala Bagian Umum kepadanya. Dalam bekerja, pria yang akrab disapa Wachid ini mengaku menjadikan pekerjaan layaknya ibadah. Dimanapun ditempatkan dalam bekerja, hendaknya selalu dapat memberikan pelayanan yang maksimal. "*Pada hakikatnya kita bekerja itu untuk dunia saja, akan tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah dan bekal di hari kemudian, maka dunia otomatis ikut tercapai juga,*" ungkap Wachid. Pegawai di Bagian Rumah Tangga Set.PP ini juga menuturkan bahwa dalam bekerja hendaknya selalu siap untuk melayani, baik melayani pegawai, pimpinan maupun tenaga pendukung. "*Jika sudah waktunya sholat kita sholat lalu siap melayani lagi. Jadi kita makan siang dan rehat itu di meja sambil siap melayani pimpinan lagi.*"

Pria yang saat ini tengah melanjutkan pendidikan pascasarjana ini mengaku menyimpan harapan kepada Set. PP, terlebih lagi usai kunjungan dari Sesjen beberapa waktu silam. Semoga Set. PP mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Keuangan dan memperoleh sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk

EOM Oktober 2021 - Adi

Adi Novandi Widiantama berhasil meraih *Employee of the Month* Oktober 2021 dengan jumlah perolehan suara dari 53 orang atau dengan persentase sebesar 20,38%. Adi mengaku sedikit kaget saat melihat namanya bersanding dengan kandidat lain pada pemilihan kali ini yang menurutnya merupakan orang-orang hebat. Ditanyai mengenai filosofinya dalam bekerja, Adi mengaku menjadikan pekerjaan layaknya hobi sehingga apapun yang dilakukan akan terasa menyenangkan. Pegawai di Subbagian Rumah Tangga Set.PP ini menjadikan keluarga sebagai motivasi utama dalamnya bekerja. Disamping itu Adi juga mengungkapkan bahwa rekan kerja dan bimbingan dari atasan menjadi pemacu baginya untuk selalu bekerja lebih baik ke depannya. Adi menyimpan harapan untuk Set.PP kedepannya agar bisa menemukan talenta-talenta kreatif di lingkungan Set. PP. Menurutnya pegawai-pegawai di Set.PP agar dapat turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menuntut kreativitas. Adi juga berharap supaya bakat-bakat yang dimiliki tidak dipendam agar dikembangkan dan memberikan sumbangsih bagi instansi kita yang lebih baik.

IT

Otomatisasi Pekerjaan Ms Word dengan Fitur Macro

Siapa yang tidak tahu fitur macro? Tentu sebagian besar dari kita sudah familiar dengan fitur tersebut. Bagi yang belum tahu, fitur macro merupakan sebuah fitur dalam sebuah aplikasi yang memungkinkan otomatisasi sebuah pekerjaan yang berulang. Fitur macro merekam aktifitas ***mouse*** dan ***keyboard*** dalam melakukan sebuah aktifitas lalu menyimpannya dalam sebuah ***script***. ***Script*** tersebut dapat kita panggil di kemudian hari ketika kita akan menjalankan sebuah aktifitas yang sama, dan ***voila,*** otomatisasi pun terjadi.

Masih belum terbayang betapa bergunanya fitur macro? Mari kita coba aplikasikan dalam pengerjaan surat banding. Dalam hal ini kita akan otomatisasikan proses merapikan ***softcopy*** penjelasan tertulis dari format yang diberikan oleh Pemohon Banding hingga menjadi format sesuai dengan yang kita kehendaki.

1. Buka file softcopy penjelasan tertulis yang akan digunakan.
2. Setelah file terbuka, klik menu view —> macro
3. Tulis nama macro yang akan dibuat.
4. Klik record.
5. Lakukan pengeditan dokumen hingga selesai dan sesuai dengan format yang dikehendaki.
6. Klik stop macro.

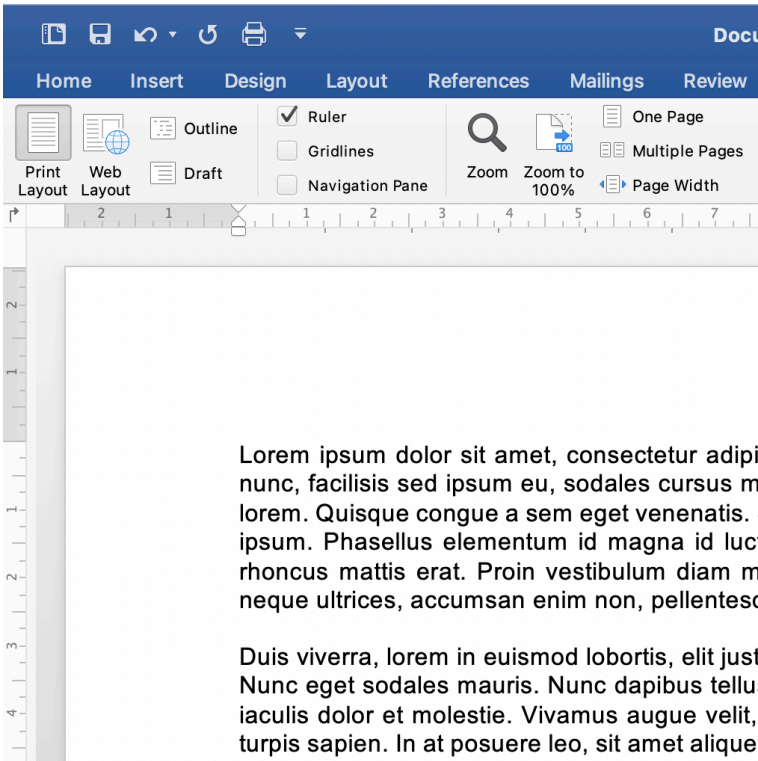

Dengan 6 langkah tersebut, kita sudah berhasil membuat sebuah macro yang mengotomatisasi pengerjaan sebuah penjelasan tertulis sampai dengan menjadi dokumen sesuai dengan format yang kita kehendaki. Bagaimana? Mudah kan.

Secara sederhana, fitur macro bisa dipahami sebagai proses merekam sebuah aktivitas dalam sebuah aplikasi dan menyimpannya dalam ***memory***, kemudian saat dibutuhkan kita memanggil rekaman tersebut dan menjalankannya pada aktivitas serupa, sehingga terjadi otomatisasi pekerjaan yang serupa.

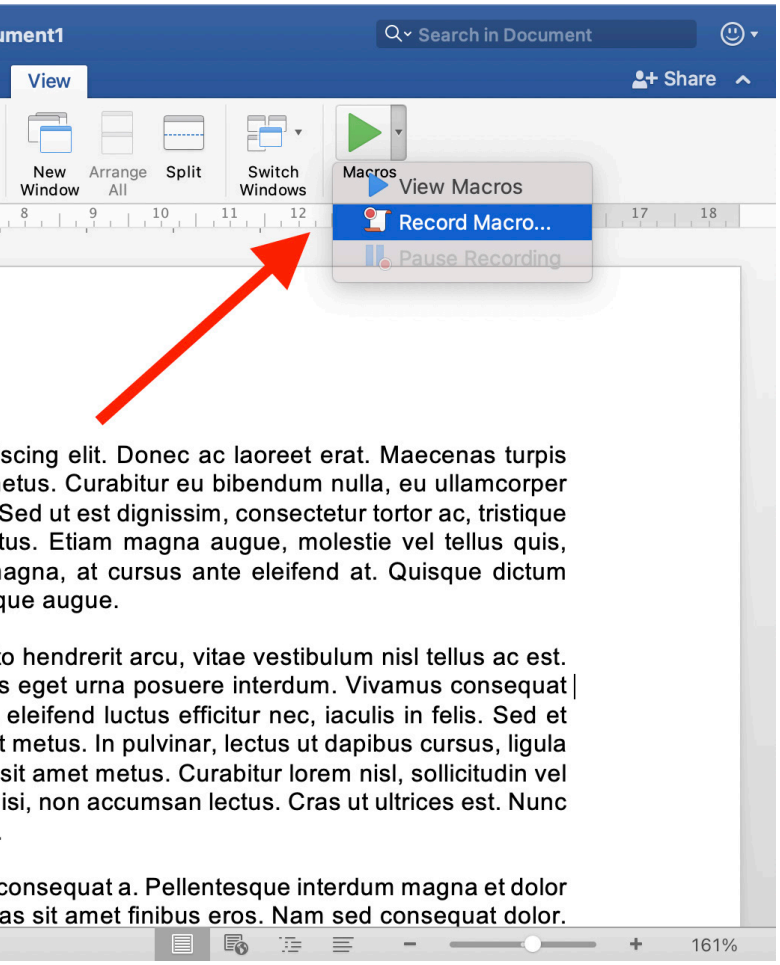

Memang fitur macro tidak selalu berjalan sempurna saat pertama kali dibuat atau saat diterapkan di dokumen yang mempunyai kondisi format tertentu. Oleh karena itu diperlukan ***trial and error*** secara berkala dan mandiri oleh setiap pengguna. Karena kebutuhan macro satu pengguna tentu berbeda dengan pengguna lain. Tetapi ketika kita berhasil meracik sebuah macro yang tepat dan tanpa ***error*** sesuai dengan kebutuhan, pekerjaan kita akan sangat terbantu. Bayangkan saja, hanya dengan satu kali klik "Run Macro" pekerjaan merapikan dokumen yang semula membutuhkan waktu beberapa menit akan selesai seketika dalam hitungan detik.

Selamat Mencoba!

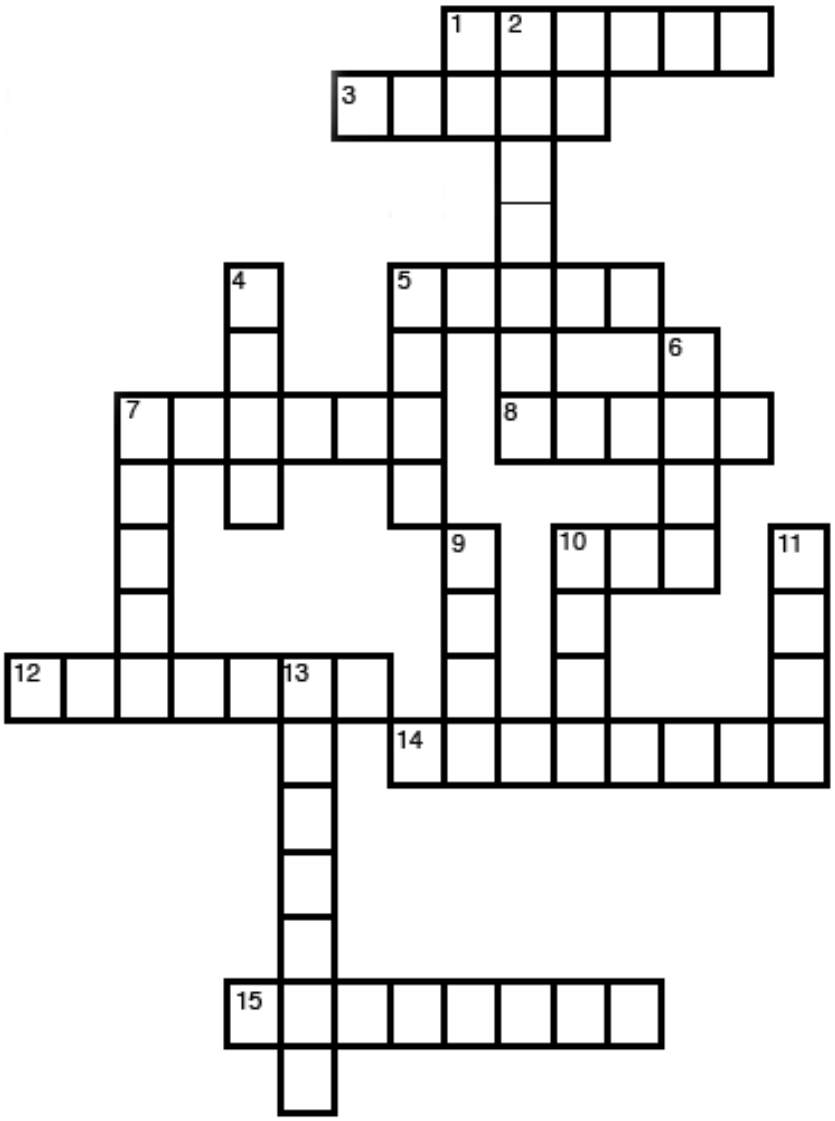

Isilah TTS ini dengan petunjuk berikut.

Mendatar

1. Berlibur
3. Letak penyesalan ada di mana?
5. biasanya dipekikan tiga kali oleh Presiden Jokowi
7. Wadah
8. Annual (terbalik)
10. Kata penunjuk
12. Bergelombang sejak 2020
14. Organisasi
15. Tertulis melekat pada kata lain di ruang ber-AC

Menurun

2. Kegiatan anak sekolah setelah terima rapor
4. Mantan istri Bruce Willis
5. Aku, kamu, dia, kami, kalian

MEREKA TAK TAHU

It's TACO Time!

@ridwan firmansyah

OPEN RECRUITMENT

Home About Contact

AYO BERGABUNG BERSAMA KAMI

TCMEDIA

ISI FORM INI KALAU KAMU TERTARIK UNTUK MENJADI BAGIAN DARI TIM TCMEDIA YAA!

bit.ly/jointeamtcmedia